

# MIKROLETISASI DAN DESTRUKSI PENDIDIKAN

Analisis Terhadap Praktek Promosi Pendidikan, Penerimaan  
dan Seleksi Peserta Didik di Lembaga Pendidikan

*Makalah  
Pendidikan*

# Mikroletisasi dan Destruksi Pendidikan

Momon Sudarma

Penulis : Momon Sudarma  
Hak Cipta : @momonsudarma  
Penerbit : Pustaka Pribadi  
Tahun : 2017

## Daftar Isi

Pendahuluan.....	2
Pragmatisme Pendidikan .....	6
Destruksi Pendidikan .....	11
<i>Maraknya seleksi mandiri</i> .....	12
<i>"Mikroletisasi" Universitas</i> .....	15
<i>Geografi For Life</i> .....	21
<i>Pramuka For Life</i> .....	26

## Pendahuluan

Di awal tahun pelajaran, setiap penyelenggara pendidikan tengah berusaha mempromosikan dagangannya. Melalui spanduk, brosur, baligo atau layanan iklan di media elektronik mereka melakukan promosi pendidikan.

Mirip dengan kampanye politik di musim pemilihan umum. Dibeberapa penjuror kota atau beberapa surat kabar dijejali dengan informasi mengenai lembaga pendidikan dan atau perguruan tinggi di kota dimaksud. Tidak tanggung-tanggung, bagi perguruan tinggi tertentu memberikan janji-janji pendidikan (atau lebih lebih tepatnya janji politik pendidikan) terhadap sesiapaapun yang rela menjadikan lembaganya sebagai tempat belajar. Ada promosi yang diimbui dengan hadiah, waktu penempuhan pendidikan, kemudahan dalam melaksanakan budaya akademik atau dengan janji siap kerja diakhir masa studi.

Realitas sosial tersebut tidak jauh berbeda dengan dunia politik di masa kampanye. Bila kalangan elit politik berkampanye lima tahun sekali, maka kalangan penyelenggara pendidikan melakukan kampanye pendidikan untuk satu tahun sekali. Khusus untuk pendidikan sekolah kejuruan, pemerintah pun merasa bertanggungjawab dalam menarik minat dan partisipasi masyarakat untuk bisa bersekolah ke jenjang sekolah kejuruan. Maka dalam bulan-bulan terakhir tahun akademik 2006-2007 ini, ada layanan iklan pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat siswa bisa bersekolah ke sekolah kejuruan.

Dari sisi hakikat pendidikan adalah hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Atau dengan kata lain, setiap individu sesungguhnya butuh dan perlu mendapatkan pendidikan. Tidak mengherankan bila sosiolog Abad ke-13 yakni Ibnu Khaldun menyebut pendidikan sebagai salah satu pranata sosial-budaya yang universal bagi setiap masyarakat. Perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat berikutnya itu, yaitu pada tempat, waktu dan model penyelenggaraan pendidikan.

Dengan kata lain, kebutuhan akan pendidikan ini merupakan satu kebutuhan dasar manusia yang tidak akan pernah hilang dalam peradaban manusia. Kemungkinan yang akan terjadi itu, hanyalah pada sisi orientasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Untuk sekedar contoh, lima atau 10 tahun sebelum krisis 1997 di kota Bandung sempat diramaikan dengan munculnya beberapa sekolah tinggi ekonomi dan perbankan. Minat terhadap sekolah ini, bukan hanya karena banyaknya pemilik modal yang berminat menyelenggarakan lembaga pendidikan, namun karena adanya dugaan (hipotesis) bahwa pada masa itu merupakan era perbankan dan era ekonomi bagi bangsa Indonesia. Dengan promosi besar-besaran pula, naiknya prestise perbankan serta tumbuhnya ekonomi Indonesia pada waktu itu, menyebabkan masyarakat Indonesia berduyun-duyun menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga perguruan tinggi dimaksud.

Pasca krisis ekonomi, sekolah berorientasi pada ekonomi dan perbankan mulai ditinggalkan masyarakat. Sebab-sebab masyarakat meninggalkan lembaga pendidikan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak hal, salah satu diantaranya adalah melemahnya masalah ekonomi dan banyaknya perbankan yang dilikuidasi atau *collapse* (runtuh). Namun demikian, bila mau dikatakan krisis ekonomi dan melorotnya citra perbankan tersebut merupakan bagian dari penyebab berakhirnya masa kejayaan sekolah tinggi ekonomi dan perbankan (atau jurusan perbankan) di Indonesia.

Kendati tidak mematikan eksistensi lembaga pendidikan terkait, namun dinamika sosial-ekonomi bangsa dan Negara, merupakan salah satu pengoreksi kehadiran lembaga pendidikan. Dan pada sisi lain, dinamika sosial-ekonomi bangsa dan Negara merupakan informasi pendukung dalam menumbuh kembangkan minat atau keinginan masyarakat untuk menentukan pilihan pendidikannya. Tekanan ekonomi yang kuat dan atau harapan untuk mengikuti proses pendidikan yang efektif, menjadi bagian dari argument pendukung bagi masyarakat untuk menentukan pilihan lembaga pendidikan anak-anaknya.

Kendati mahal, misalnya, bagi orangtua yang mampu akan berusaha keras meraih kesempatan pendidikan di jurusan (lembaga) pada lembaga pendidikan tersebut. Sebut sajalah jurusan pendidikan kedokteran. Lembaga pendidikan ini, dianggap sebagai program pendidikan yang efektif. Dalam konteks ini, yang di sebut pendidikan yang efektif yaitu bila waktu pendidikan dan biaya pendidikan dianggap masuk akal dan dapat dipercaya dan pasti dalam memberikan masa depan anaknya. Sementara yang dimaksud dengan lembaga pendidikan yang tidak efektif yaitu tidak adanya kejelasan atau kepastian masa depan lulusan pendidikan setelah mereka menghabiskan waktu dan biaya pendidikan.

Maraknya media massa (elektronik maupun cetak) telah mengangkat citra jurusan komunikasi sebagai lembaga pendidikan yang diasumsikan akan lebih efektif dibandingkan dengan jurusan lainnya. Demikian pula dengan jurusan pendidikan computer. Untuk program pendidikan keguruan ada trend yang menarik, kendatipun tidak pernah menyebabkan *booming*, namun memiliki pasar yang jelas dan stabil. Sehingga lembaga pendidikan keguruan ini mampu bertahan dari badai krisis ekonomi. Selain memiliki lapangan kerja yang jelas, juga didukung oleh menguatnya perhatian pemerintah pada dunia pendidikan.

Berdasarkan analisa tersebut, ada dua hal menarik yang dapat dikemukakan pada saat ini.

*Pertama*, citra lembaga pendidikan dipengaruhi oleh trend perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Simpulan ini, walaupun penulis belum memiliki data hasil riset— dapat dilihat dari adanya fluktuasi lembaga pendidikan yang ada selama penerimaan siswa/mahasiswa baru.

Untuk tingkat pendidikan menengah atas, sekolah kejuruan mulai banyak diminat. Pada tahun 2004-2005 penulis sempat merasakan sebagai orang yang berusaha membangun sekolah kejuruan bidang kajian computer. Kendatipun hanya bertugas sebentar (sekitar 3 semester) namun animo masyarakat terhadap sekolah kejuruan ini sangat tinggi. Terbukti pada tahun

berikutnya, jumlah siswa di sekolah tersebut naik 125 % dari sebelumnya. Jumlah siswa pada awal penyelenggaraan, ada 17 siswa dan pada saat penulis keluar dari lembaga pendidikan itu karena pindah tugas ke sekolah umum, sekolah ini memiliki siswa 73 orang untuk jenjang kelas X (dulu disebutnya kelas 1).

Selain sekolah menengah kejuruan computer, sekolah menengah kejuruan yang lain pun mulai marak kembali. Terlebih lagi, setelah adanya promosi pendidikan yang dilakukan pemerintah mengenai keunggulan sekolah kejuruan. Bukan hal yang mustahil, dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang sekolah kejuruan ini akan semakin meningkat.

Fenomena ini pun akan terjadi pula dalam dunia pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah yang dianggap efektif, akan menjadi sekolah yang menjadi favorit bagi masyarakat. Terlebih lagi, biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi swasta.

*Kedua*, sehubungan dengan penalaran yang pertama tadi, pemerintah hendaknya memperhatikan trend perkembangan social-ekonomi bangsa dan dunia, serta tingkat kejenuhan lembaga dan lulusan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak efektif atau tingginya pengangguran intelektual, merupakan akibat dari tidak pekanya pemerintah dalam memetakan kebutuhan dasar dan supply sumberdaya manusia lulusan pendidikan. Sejatinya, pemerintah dapat membuat koreksi terhadap lembaga pendidikan yang kurang efektif atau tidak memberikan efek pemberdayaan kepada lulusan pendidikan.

*Ketiga*, merujuk pada analisa tersebut maka pada saat ini merupakan momentum yang strategis bagi masyarakat untuk mengoreksi dunia pendidikan. Artinya, menyekolahkan anak ke dunia pendidikan itu bukan sekedar untuk meraih citra sosial dari lembaga pendidikan tersebut, melainkan lebih disebabkan karena adanya misi orang tua dalam memberdayakan potensi anak demi kehidupan di masa depannya.

Pendidikan adalah usaha sadar dalam membebaskan dan memberdayakan anak didik. Sementara menyekolahkan merupakan usaha sadar orang tua dalam memberikan fasilitas pemberdayaan anak. Kehilafan orang tua mendukung pilihan pendidikan dapat menyebabkan anak dan orangtua tersebut mendapatkan citra sosial belaka. Tidak salah memilih sekolah favorit, tetapi bila hal ini hanya dilandasi oleh citra sosial dan gengsi sosial, maka setelah lulus dari lembaga pendidikan tersebut anak pun hanya akan mendapatkan citra sosial belaka, dan bukan jalan masa depan yang lempang.

Oleh karena itu, masa pendaftaran baik untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi merupakan kebebasan orang tua dan anak untuk mengoreksi dunia pendidikan. Tunjukkan kebebasan diri dalam menentukan pilihan tempat untuk memberdayakan diri. Ingat, pilihan ini ibarat pemilu dalam politik. Janji politik pendidikan adalah sebuah janji. Hasil yang sesungguhnya adalah fakta sosial. Dan janji itu bukanlah fakta. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam menentukan pilihan pendidikan.

### Pragmatisme Pendidikan

Yang korban tetap anak bangsa. Inilah yang dapat dilihat dari peristiwa awal dan akhir pendidikan. Bila pada akhir pendidikan, beberapa minggu yang lalu dunia pendidikan sempat diramaikan dengan isu seputar Ujian Nasional (UN). Mulai dari keabsahan, validitas sasaran dan tujuan penilaian sampai pada isu permainan dibalik permukaan hasil-hasil ujian nasional. Tidak mengherankan, bila hasil dari UN itu kemudian mencengangkan –walaupun sungguh membahagiakan—karena ternyata hasil pendidikan anak bangsa itu mencapai rata-rata yang cukup tinggi bahkan tidak jarang ada anak yang mampu mencapai nilai UN mendekati angka sempurna.

Apapun dugaan orang terhadap perilaku aparaturnya pendidikan (atau oknum) yang melakukan 'rekayasa' terhadap nilai-nilai

tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ada sikap pragmatis dari kalangan tertentu terhadap masalah pendidikan. Hasil pendidikan seolah-olah dapat dinilai dari 'angka' dari hasil belajar anak didik. Hasil pendidikan seolah-olah dapat diselesaikan dengan 'prosentase' kelulusan dari lembaga pendidikan. Meminjam istilah Tibor R Machan (2006) sesungguhnya peristiwa ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk 'penyelewengan gagasan'.

Konsep peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan, merupakan satu ide yang mulia dan sangat dibutuhkan oleh setiap insan di Indonesia. Kebutuhan untuk mencapai hal tersebut, merupakan bagian dari upaya dan kebutuhan bangsa dalam membangun daya saing bangsa di masa depan.

Kualitas lulusan atau peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan asset sosial yang sangat berharga dan strategis dalam membangun Indonesia masa depan. Namun sekali lagi, lagi-lagi kita harus bertanya dengan penuh ketulusan nurani, akankah tindakan di masa kemarin itu telah membangun citra pendidikan Indonesia semakin lebih baik atau lebih terpuruk.

Penyelewengan gagasan dengan memanipulasi kebutuhan peningkatan kualitas mutu dan lulusan pendidikan dengan indikator-indikator yang dangkal makna dan syarat sikap pragmatis hanyalah akan melahirkan pembusukan citra pendidikan dan keluhuran dunia pendidikan itu sendiri. Pada konteks inilah, akhir proses pendidikan Indonesia (terancam) warna pragmatisme pendidikan. Dan yang lucu lagi, pelaku sikap pragmatis pendidikan itu bukan anak didik melainkan para pelaku penyelenggara pendidikan dan atau birokrat pendidikan itu sendiri. Karena si anak didik itu sendiri, diam seribu basa dengan posisi sebagai pion.

Bagaimana dengan awal kegiatan proses pendidikan ?

Entah ini sebuah kasus atau juga warna yang seragam (*homogen*) untuk berbagai proses rekrutmen peserta didik (siswa atau mahasiswa) oleh penyelenggara pendidikan. Pada sore itu, ada seorang purnawirawan mengeluhkan kejadian yang



menimpa dirinya ketika diperlakukan kurang 'etis' oleh seorang panitia penyelenggara pendidikan.

Pada mulanya, sang purnawirawan itu merasa tidak mengerti terhadap apa yang sedang terjadi. Entah pura-pura tidak paham atau memang komunikasi dari panitia penyelenggara yang bersayap sehingga dapat disalahpahami oleh orang yang diajak bicaranya. Singkat kisah, nasib kelulusan cucu purnawirawan pada sekolah lanjutan pertama tersebut menjadi tidak jelas. Kendati membawa surat keterangan dari Kecamatan mengenai status domisili sang cucu yang mestinya mendapat perhatian lebih dari pihak sekolah, namun pada dialog tersebut menjadi sangat tidak jelas. Selidik punya selidik, setelah berkomunikasi dengan orang tua peserta lain, bapak purnawirawan itu baru nyadar "ngeuh" bahwa yang menjadi masalah itu adalah ketidakjelasan dari dirinya terhadap nilai sumbangan pembangunan kepada sekolah, di luar yang ditetapkan panitia.

Bapak purnawirawan itu menyimpulkan, masuk sekolah itu sebenarnya murah yang mahal itu adalah meyakinkan diri bahwa anak kita dapat masuk ke sekolah tertentu itulah yang mahal. Biaya untuk membawa keyakinan bahwa cucunya (atau anaknya) dapat diterima pada sekolah yang diidamkannya, menjadi penyebab awal mahalnya pendidikan di Indonesia (minimalnya di daerah bapak Purnawirawan tersebut).

Merujuk pada kajian tersebut tadi, ada beberapa simpulan pemikiran yang dapat dijadikan perenungan bagi semua pihak, khususnya para penyelenggara pendidikan di Indonesia.

*Pertama*, proses pendidikan di Indonesia cenderung diwarnai oleh sikap pragmatisme orang di luar peserta didik itu sendiri. Bila diakhir masa pendidikan, pragmatisme ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan dan birokrat pendidikan, maka di awal penyelenggaraan pendidikan (penerimaan siswa baru) sikap pragmatisme ini dilakukan (lebih tepatnya didukung) oleh orang tua dan penyelenggara pendidikan. Tidak mengherankan, bila orangtua banyak yang dipusingkan dengan puluhan (atau mungkin ratusan) biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya pada sebuah jurusan di perguruan tinggi.

Untuk masuk ke sekolah pendidikan pertama atau sekolah menengah atas (SMA) pun biaya masuk sekolah itu bisa mencapai belasan atau puluhan juta.

Tanpa harus memperhatikan kemampuan akademik, minat bakat anak, atau tahapan perkembangan psikologi anak, orang tua berlomba-lomba untuk mengejar citra keluarga dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit tertentu. Bila dicermati dengan seksama, kejadian ini tidak jauh berbeda dengan mengorbankan minat bakat anak dan hakekat pendidikan, oleh pengejaran citra sosial oleh kalangan orang tua dan pragmatisme ekonomi di kalangan penyelenggara pendidikan.

*Kedua*, ketiga pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (orangtua, penyelenggara pendidikan dan birokrat pendidikan) adalah oknum-oknum yang telah memperkosa hakikat pendidikan sekaligus (khusus untuk penyelenggara dan birokrat pendidikan) melanggar tujuan pendidikan di Indonesia.

Dalam Pasal 31 UUD 1945 termaktub sebuah *dictum* pemerataan, persamaan akses dan hak asasi warga Indonesia yakni semua anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak. Pasal ini menjadi ruh asasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun pada kenyataannya, semangat dasar UUD 1945 ini ditutup oleh mekanisme 'internal' lembaga penyelenggara pendidikannya dengan aturan-aturan konvensional yang menjadi *selector* terhadap warga Negara.

Lebih mengerikan lagi alat seleksinya (*selector*) tersebut, bukan sesuatu hal yang bisa ditunjukkan secara bersama oleh seluruh warga Negara (kompetensi individu) melainkan oleh variable ekonomi. Pada konteks inilah ruh penyelenggaraan pendidikan telah ditenggelamkan oleh kebijakan konvensional para penyelenggara pendidikan.

Terakhir, kejadian ini memang tidak serta merta muncul ke permukaan. Fenomena ini muncul dan berkembang di Indonesia seiring dengan adanya permintaan dari masyarakat. Berdasarkan teori ekonomi, transaksi dapat dilaksanakan bila

ada kesepahaman antara penawaran dan permintaan. Penawaran akan muncul bila ada permintaan. Sikap pragmatisme di lingkungan pendidikan memang merupakan satu misteri yang masih membutuhkan riset yang mendalam. Artinya sikap pragmatis dalam dunia pendidikan ini, (a) apakah diawali oleh para penyelenggara pendidikan, (b) sikap orang tua yang semakin pragmatis, (c) atau birokrat pendidikan yang telah terbiasa dengan budaya pragmatis. Namun demikian, simpulan yang dapat dengan mudah diterima nalar saat ini, sikap pragmatis terjadi karena ada kemauan, kesepahaman dan tujuan khusus antara pelaku untuk melakukan praktek-praktek dimaksud.

Mencermati fenomena tersebut, akankah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia akan melahirkan proses belajar mengajar yang bermutu dan berkualitas, bila di awal dan akhir penyelenggaraan pendidikan itu diwarnai oleh penyelewengan gagasan pendidikan yang mulia ? akankah Indonesia mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, bila diawal dan akhir penyelenggaraan pendidikan itu diwarnai oleh sikap pragmatisme (lebih tepatnya nalar ekonomi) di luar kebutuhan anak didik itu sendiri ?

Khusus untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SLTP), kiranya pemerintah harus turun tangan dalam menertibkan trend atau kecenderungan ini. Karena bila hal ini tidak disikapi dengan baik oleh pemerintah, maka rendahnya partisipasi pendidikan di Indonesia bukan disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, namun oleh budaya awal dan akhir pendidikan para penyelenggara yang tidak mampu diikuti oleh kemampuan masyarakat. Bila pemerintah tidak memperhatikan fenomena ini, maka jangan salahkan, bila masyarakat skeptis terhadap dunia pendidikan.

Bila kondisi ini dibiarkan, proses pendidikan tidak akan jauh berbeda dengan "gendang". Di muka ditutup rapat, di belakang tertutup rapat. Sementara ditengah-tengahnya kosong melompong tak berisi. Awal masuk pendidikan sangat sulit, dan keluar pendidikannya pun dipersulit. Sementara di tengah proses pendidikannya biasa saja. Akibat dari sikap pragmatis ini, yang

korban tetap cuma satu orang, yaitu peserta didik atau anak bangsa itu sendiri.

## **Destruksi Pendidikan**

Pengumuman hasil UN sudah diketahui publik. Anak tingkat akhir SMU/MA/SMK sudah mendapatkan apa yang sudah diketahuinya. Bagi orang yang masih berminat untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ada satu tahap ujian lagi yang mereka harus perjuangkan. Itulah yang disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Dua atau tiga tahun sebelumnya, ujian masuk perguruan tinggi (UMPTN atau SPMB) masih memiliki prestise sosial yang sangat tinggi. Peserta atau kandidat ujian SPMB memiliki gengsi sosial yang tinggi di mata para calon mahasiswa. Dan mereka yang mampu lolos dari saringan ketat ujian itu, diapresiasi dan dipersepsi sebagai calon mahasiswa unggulan yang mampu menyihkan ratusan pesaing yang lainnya.

Bercermindari pengalaman mengikuti kegiatan SPMB (UMPTN) ada 2 (dua) nilai utama yang tumbuhkembang dalam diri individu, yaitu nilai sosial dan semangat kompetisi. SPMB masih dipersepsi sebagai satu seleksi yang mengandalkan kemampuan intelektual (walaupun ada unsur keberuntungannya) individu. Maka tidak mengherankan, mereka yang berharap mengikuti ujian ini akan belajar keras supaya bisa mencapai tujuan dimaksudkan. Bimbingan belajar dan buku kumpulan soal SPMB bak jamur di musim hujan disambut oleh calon-calon mahasiswa di setiap penjuru Indonesia.

Pada sisi lain, model seleksi masuk ke perguruan tinggi pun menanamkan semangat kompetisi yang sehat dalam meraih bangku kuliah di perguruan tinggi negeri. Bahkan, sebelum

menentukan pilihan studi di perguruan tingginya, setiap individu berusaha membaca kekuatan kompetitor pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, selain melihat *passing grade* (batas bawah nilai masuk) mereka pun memperhatikan jumlah kompetitor (rasio pesaing) dalam satu jurusan tertentu di perguruan tinggi yang akan ditujunya.

Namun demikian, dengan melihat perkembangan yang ada saat ini, akankah dua semangat dasar SPMB kemarin akan terus berkembang di masa saat ini ?

### *Maraknya seleksi mandiri*

Hal yang tidak bisa dipungkiri, setia perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini memiliki model-model seleksi khusus dalam menjaring calon mahasiswanya. Nama-nama model seleksi tersebut yakni PMDK (Penelusuran Minat, Bakat dan Kemampuan), ujian mandiri, ujian lokal, seleksi masuk universitas, dan jalur khusus. Model-model seleksi mandiri tersebut, memiliki dua ciri utama, yaitu (a) dilaksanakan di luar SPMB, dan (b) terciumnya warna seleksi ekonomi dibandingkan intelektual.

Melihat karakteristik seleksi mandiri seperti itu, ada beberapa fenomena yang sedang terjadi dan atau potensial terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri.

*Pertama*, perguruan tinggi negeri di Indonesia membuka lebih dari satu pintu masuk bagi calon mahasiswanya. Bahkan bagi perguruan tinggi negeri tertentu, kadang membuka program ekstensi, diploma dan jalur khusus. Dengan kata lain, perguruan tinggi dimaksud memiliki 5 (lima) pintu masuk ke perguruan tinggi. Mirip dengan supir mikrolet, setiap PTN berkreasi model

seleksi untuk memburu kuota calon mahasiswa yang sebanyak-banyaknya. Pintu masuk ke lembaganya dibuka selebar-lebarnya, dengan berbagai karakter 'alat seleksi' yang berbeda. Artinya, ada yang menggunakan seleksi intelektual, minat dan bakat, dan juga menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat saring masuk PTN. Para penyelenggara PTN seolah-olah dikejar setoran untuk sampai ke terminal BHP.

*Kedua*, bagi mahasiswa yang rata-rata (baik dari sisi ekonomi maupun intelektual) akan memberanikan diri untuk mengikuti SPMB. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, akan berusaha keras untuk masuk ke perguruan tinggi dimaksudkan melalui jalur khusus. Tidak mengherankan, ada seorang tetangga yang saat ini sedang dipusingkan oleh keinginan anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kendati mereka (anak dan ayah) menyadari bahwa kemampuan intelektual anaknya pas-pasan, namun anaknya berhasrat masuk ke PTN, maka sang ayah tengah berusaha keras menjual kendaraannya untuk modal masuk PTN yang dituju.

*Ketiga*, hipotesis yang paling riskan adalah bila pendekatan ekonomi didahulukan dan masalah intelektual dikesampingkan, kondisi ini potensial menjadi penyebab menurunnya raw input (bahan mentah yang masuk). Hal ini dilatari oleh kenyataan bahwa jalur mandiri atau jalur khusus, merupakan jalur seleksi yang diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Joki di lingkungan siswa menyatakan "bila berani silakan ikutan SPMB, tapi kalau otak pas-pasan mendingan mencari jalur khusus". Pernyataan ini yakin tidak seluruhnya tepat, namun tetap harus dicermati.

*Keempat*, tingginya minat masyarakat mengikuti jalur seleksi mandiri ke PTN merupakan indikasi bahwa animo masyarakat masuk perguruan tinggi negeri masih sangat tinggi. Banyak hal yang menyebabkan animo masyarakat ke PTN ini masih

menjulung tinggi. Misalnya saja, adanya persepsi bahwa PTN memiliki kualitas pendidikan yang baik, biaya pendidikan yang rendah dan citra sosial yang positif pada bidang pekerjaan masing-masing. Artinya citra sosial lembaga perguruan tinggi, pada bidang pekerjaannya masing-masing sudah menjadi 'jaminan sosial' akan mutu lulusannya. Akumulasi dari faktor ekonomi, sosial dan kompetensi itulah, kemudian menyebabkan berbondong-bondongnya masyarakat ke PTN.

Untuk konteks masa kini, citra seperti ini sudah tentu tidak tepat. Terlebih lagi bagi perguruan tinggi yang sedang bersiap-siap menuju BHP (Badan Hukum Pendidikan) atau BHMN (Badan Hukum Milik Negara). PTN yang berhasrat ke arah sana, akan berusaha keras untuk memperkuat pundi-pundi ekonomi lembaganya sehingga misi menjadi *research university*. Maka tidak mengherankan, bila di beberapa perguruan tinggi sempat muncul demonstrasi mahasiswa menentang kebijakan universitas yang menaikkan biaya pendidikan.

Gelagat perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan di lingkungan PTN ini belum banyak berubah di benak masyarakat. Sampai saat ini, masih tertanam citra bahwa PTN memiliki biaya pendidikan yang lebih murah dibandingkan dengan PTS. Pada kenyataannya, nilai biaya pendidikan di PTN ini sangat kompetitif, artinya selain ada PTN yang berbiaya pendidikan lebih murah, namun ada pula biaya pendidikan di PTN tertentu yang lebih mahal dari PTS.

Bila setiap perguruan tinggi menyelenggarakan seleksi mandiri serta meraup jumlah siswa dalam jumlah yang tinggi dan terlebih lagi bila dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan SPMB, maka jumlah peserta SPMB potensial akan melorot. Bagi kelompok siswa yang kurang percaya diri untuk bersaing di tingkat SPMB mereka akan langsung memilih model seleksi mandiri. Sementara mereka yang memiliki kekuatan ekonomi pas-pasan,

akan berusaha keras untuk mengikuti jalur SPMB sebagai pertaruhannya memasuki PTN. Bila demikian, akankah rasa bangga menjadi "SPMB idol" atau "menjadi mahasiswa PTN"?

Kelompok bisnis pendidikan yang terancam "gulung bangku" kemungkinan akan dialami oleh para penyelenggara bimbingan belajar dan perguruan tinggi swasta. Dengan adanya seleksi mandiri atau jalur khusus, dapat menyebabkan para siswa (dan orang tua) mengoreksi keinginannya untuk menambah jam pelajaran kepada anak-anaknya.

Tanpa ada manajemen pengelolaan seleksi mandiri yang berkualitas dan atau mengedepankan jaminan mutu seleksi, maka model seleksi mandiri ini akan menjadi faktor perusak terhadap model SPMB. Atau memang inilah cikal bakal dari usaha menghapuskan model-model ujian yang bersifat massal dan nasional. Bukankah SPMB pun adalah sejenis ujian yang menggunakan standar "nasional" ? bukankah banyak pihak yang menentang UN ? atau jangan-jangan dalam dua atau lima tahun ke depan, di tingkat sekolah SMP-SMA pun akan disuburkan dengan model seleksi masuk mandiri demi menghapuskan fungsi dan citra UN ?

### "Mikroletisasi" Universitas <sup>1</sup>

Bagi orang kota --baik di kota besar maupun kota kecil-- kebutuhan angkutan umum (angkot) menjadi satu kebutuhan utama dalam mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari. Dengan hadirnya angkot ini, kian meramaikan suasana sebuah kota. Kendati tidak tepat, namun ada juga yang mengukur kualitas 'kekotaan' sebuah daerah dengan melihat jumlah

---

<sup>1</sup> Dimuat Kompas, 14 Juni 2007



kendaraan umum yang berkeliaran di jalan raya. Semakin ramai jalan raya oleh para pengguna jalan raya, menunjukkan semakin tinggi mobilitas dan aktivitas penduduk kota.

Sementara itu, bagi masyarakat kota yang belum mempunyai kendaraan pribadi kehadiran angkot menjadi pilihan utama. Atau bagi mereka yang berhasrat melakukan wisata perjalanan dalam kota, angkot dapat dijadikan sebagai alternatifnya. Ada beberapa nama yang biasa dikenal dikalangan para pengguna jasa angkutan umum ini, misalnya angkot, metromini, bajaj, dan mikrolet.

Dalam amatan sosiologis, disetiap komunitas termasuk komunitas supir angkutan umum akan memiliki prinsip atau budaya hidup yang berbeda dibandingkan dengan komunitas yang lainnya. Secara teoritik budaya komunitas supir akan berbeda dengan komunitas pasar atau komunitas rumah sakit. Pada konteks ini, kita akan sebut sebagai "budaya mikrolet".

Seiring dengan hal ini, bagaimana dan apa jadinya bila prinsip dan budaya hidup supir mikro diterapkan oleh kalangan penyelenggara pendidikan tinggi (universitas) ? inilah pertanyaan strategis yang perlu dicermati. Kendati memang, ada pihak lain yang balik bertanya mengenai kehadirannya budaya hidup pemilik supir mikro di lingkungan Universitas. Namun untuk masalah ini, ada beberapa budaya hidup pemilik supir mikro yang dapat dikemukakan, dan dijadikan pisau analisis untuk melihat budaya kerja penyelenggara pendidikan.

*Pertama*, setiap supir angkot adalah kelompok usaha atau kelompok kerja yang memiliki target omset (pendapatan) untuk setiap harinya. Setiap hari seorang supir angkot dituntut untuk memiliki sejumlah uang untuk disetorkan ke pemilik kendaraan. Bila dalam satu hari mereka tidak mencapai target, maka dia akan dipaksa untuk merogoh dompet pribadinya untuk menutupi

kekuarangan setoran tersebut. Dan bila hal itu tidak dapat mereka lakukan, maka dari hari ke hari supir angkot akan menumpuk utang yang semakin tinggi, dan bukan hal yang mustahil akan berujung pada pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dikalangan mikro tumbuh semangat mengejar setoran.

Semangat dikejar setoran ini dapat terjadi di lingkungan universitas. Bagi mereka yang berada dibawah kendali yayasan atau tim manajemen tertentu, para penyelenggara pendidikan akan berusaha keras untuk mempersiapkan sejumlah dana setoran ke pemilik yayasan pendidikan. Sedangkan di lingkungan PTN, khususnya yang berambisi ke arah BHP, akan bekerja keras untuk mengumpulkan dan membengkakkan pundi-pundi universitasnya guna mewujudkan impiannya menjadi PT yang ber-BHP.

Lomba-lomba perguruan tinggi membuka seleksi mandiri atau penerimaan mahasiswa baru, merupakan cara yang strategis dalam mengumpulkan dana pendidikan. Dalam pendekatan yang konvensional, upaya meningkatkan pundi-pundi universitas dilakukan dengan cara menaikkan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang sudah terjaring di universitas.

Pada konteks inilah, dapat dikatakan bahwa para penyelenggara pendidikan sudah terimbas semangat supir mikrolet dalam mengejar setoran guna mencapai impian masa depannya.

*Kedua*, seperti yang banyak dirasakan para penumpang bila naik mikrolet, perguruan tinggi di Indonesia pun ada yang menerapkan prinsip layanan yang cepat sampai pada tujuan. Ada perguruan tinggi yang menerapkan biaya murah namun cepat sampai tujuan, dan ada pula yang menerapkan biaya sedikit tinggi namun dijamin cepat sampai pada tujuan.

Sehubungan dengan budaya ini, masyarakat dapat melihat ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan jaminan untuk mencapai kualifikasi sarjana dalam waktu yang sangat singkat. Asal para calon mau mengeluarkan biaya lebih tinggi, seseorang akan dihantarkan ke tujuan (menjadi sarjana) relatif lebih cepat dibandingkan dengan lama pendidikan reguler.

Mirip dengan kebiasaan supir angkot. Mereka akan membawa penumpang dengan laju kendaraan yang sangat kencang tanpa memperhatikan kualitas pelayanan dan kenyamanan para penumpang. Yang penting cepat sampai pada tujuan, dan mendukung tujuan para penumpang tersebut. Setelah berlari kencang mengantarkan para penumpang tersebut, kemudian mereka balik lagi mencari mencari penumpang baru untuk diantarkan ke tujuan berikutnya.

Semangat ini dapat dijadikan salah satu tafsir terhadap beberapa spanduk promosi pendidikan yang memberikan jaminan pencapaian ijazah pendidikan dengan waktu yang sangat cepat.

*Ketiga*, selama naik kendaraan dengan deru dan laju kendaraan yang cepat setiap penumpang kurang mendapat kenyamanan, ketenangan dan layanan prima. Bahkan tidak jarang, kalau naik kendaraan umum seperti ini akan disesaki oleh penumpang. Ya, ruangan dalam angkot yang sempit namun penumpang berjubel.

Model mikrolet seperti inilah yang mulai bermunculan di lingkungan pendidikan tinggi. Fasilitas belajar yang kurang, kenyamanan yang rendah dan layanan pendidikan yang tidak efektif, sementara dilain pihak jumlah peserta didiknya begitu sangat melimpah.. kondisi inilah yang merupakan beberapa ciri dari mikroletisasi pelayanan pendidikan.

Fenomena adanya fasilitas pendidikan minim yang dipakai oleh jumlah peserta didik yang tinggi, menjadi fenomena umum di beberapa perguruan tinggi atau sekolah di Indonesia. Sudah

sangat jelas, implikasi dari kondisi ini yaitu akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas proses pendidikan di ruang belajar tersebut.

Suatu hari, penulis sempat melihat ada satu model perkuliahan di PTN yang mirip tabligh akbar (ceramah umum). Dalam satu ruangan dengan dipenuhi mahasiswa yang berencana untuk belajar, kemudian mendengarkan suara dosen yang berdiri di depan kelas. Aneh dan unik. Ruangan kecil tetapi jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Tidak mengherankan bila kondisi belajar seperti ini, potensial digunakan mahasiswa untuk 'main game' pada ponselnya sendiri.

*Keempat*, yang lebih memprihatinkan lagi yaitu adanya usaha membabi buta para supir angkot dalam menarik para penumpang. Bagi mereka yang penting penumpang naik ke kendaraannya dan kemudian membayar ongkos. Kegiatan seperti ini menjadi ritualisme supir angkot.

Ritualisme penyelenggara pendidikan, muncul dengan bentuk penjarangan mahasiswa dengan berbagai program dan model seleksi ke lembaga pendidikannya. Namun dibalik itu semua, setiap penyelenggara pendidikan tidak pernah memberikan 'jaminan teoritik dan praktis' masa depan dari para lulusannya tersebut. Bagi mereka, penyelenggara pendidikan telah menjadi rutinitas tahunan, tanpa ada kesungguhan untuk melakukan refleksi dan implikasi dari kebijakannya.

Tingginya jumlah pengangguran intelektual dan tidak terserapnya lulusan perguruan tinggi oleh lapangan kerja merupakan kekeliruan pengelolaan pendidikan tinggi dalam membuka program pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, para penyelenggara saat ini *lebih banyak dikendalikan oleh isu populer dibandingkan hasil riset pasar pendidikan.*

Yang dimaksud mikroletisasi adalah proses pemunculan budaya kerja penyelenggara jasa mikrolet terhadap kehidupan seseorang. Budaya mikrolet yang dimaksudkan itu yaitu tradisi mengejar setoran, layanan yang minim untuk jumlah pengguna jasa yang tinggi, kurang memperhatikan kualitas, ritualisme dan lebih mengutamakan waktu dibandingkan mutu. Pribadi atau individu yang menunjukkan ciri-ciri itulah, yang dapat disebut mikroletisasi perilaku pada diri orang dimaksud.

Universitas atau lembaga pendidikan adalah sebuah pranata pendidikan yang dijadikan 'kendaraan' dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui lembaga pendidikan inilah, para penyelenggara pendidikan yang terdiri dari pengelola dan tenaga pendidik berusaha memberikan pelayanan kepada peserta didik. Tujuan dasar dari layanan pendidikan ini adalah memberikan fasilitas pendidikan, pemberdayaan dan pembudidayaan kepada peserta didik. Secara normatif, melalui pendidikan inilah diharapkan setiap individu mampu mengaktualisasikan diri dan mampu hidup di masyarakat.

Namun demikian, akankah tujuan ideal lembaga pendidikan itu akan dapat diwujudkan bila semangat dasar penyelenggaraan pendidikan tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang disebut di atas ?

Merujuk pada cermatan di atas, sesungguhnya mengantarkan hipotesis (dugaan pemikiran) bahwa pada masa kini telah terjadi mikroletisasi universitas di Indonesia. Menggejala mikroletisasi ini, bisa disebabkan karena lembaga pendidikan tengah menghadapi tekanan ekonomi, atau justru karena adanya pergeseran semangat dasar pengelolaan lembaga pendidikan dari layanan sosial ke aras layanan ekonomi. Dengan kata lain, fenomena dapat terjadi karena adanya himpitan atau jalinan yang erat antara pendidikan dengan semangat kapitalisme

pendidikan. Entah mana yang memberikan pengaruh, apakah semangat kapitalisme yang kemudian menyebabkan mikroletisasi atau sebaliknya.

Untuk mendapatkan mutu yang berkualitas memang membutuhkan biaya. Namun, haruskan tujuan peningkatan SDM ini dilakukan dengan cara mikroletisasi pendidikan seperti ini ?

Dalam konteks ini, kita melihatnya, reorientasi pendidikan, baik dalam skala mata pelajaran ataupun ekstrakurikuler, perlu diorientasikan untuk penguatan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Untuk memudahkan hal ini, akan diulas dua wacana penting, yakni geografi for life dan pramuka for life.

### *Geografi For Life<sup>2</sup>*

Hal yang mengejutkan, pada saat liburan sekolah tahun 2007 diberitakan ada 7 orang siswa SMP dari Jakarta yang meninggal di Puncak Kawah Ratu Sukabumi. Nasib ketujuh siswa ini tidak tertolong setelah mereka menghirup udara beracun yang dikeluarkan Kawah Ratu – Sukabumi. Urung saja, setelah melihat kejadian ini, ada beberapa orang tua yang kemudian menyalahkan pihak sekolah dan khususnya menyalahkan Pembina Pramuka yang menjadi penanggungjawab kegiatan camping akhir tahun tersebut. Kejadian itu benar-benar merupakan satu kejadian yang memprihatinkan, memilukan dan sekaligus merupakan satu tantangan yang serius bagi kalangan pendidik, khususnya guru geografi. Mengapa demikian ?

Bila dilihat kembali, kejadian yang menimpa 7 (tujuh) siswa dari sebuah SMP di Jakarta tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku yang kurang memahami sifat atau karakter alam. Anak-anak tersebut naik ke puncak gunung tanpa memperhatikan

---

<sup>2</sup> SKM Medikom. Edisi 236 Tahun IV, 13-19 Agustus 2007

kemungkinan menghirup asap mengandung belerang dari kawah Ratu – Sukabumi.

Pertanyaannya, apakah mereka tidak diajari mengenai bahayanya belerang atau asap dari gunung api ? apakah guru geografi tidak menjelaskan mengenai aspek kesehatan dari berbagai fenomena geosfera di muka bumi ini ?

Berdasarkan pengalaman dan diskusi dengan beberapa guru geografi, memang masalah potensi kesehatan atau lebih tepatnya ancaman dan bahaya dari berbagai kejadian alam terhadap masalah kesehatan kurang mendapat perhatian dari guru geografi. Kebanyakan guru geografi lebih menekankan pada aspek-aspek kurikuler (materi yang dituntut kurikulum) dibandingkan dengan aspek-aspek kesehatan dari lingkungan geosfera.

Pada sisi lain, secara formal kurikulum geografi pun memang tidak menekankan pentingnya penjelasan mengenai aspek kesehatan dari fenomena geografi. Bila ditelaah dengan seksama, kurikulum pendidikan geografi pada jenjang pendidikan dan pendidikan menengah memang tidak menuntut pentingnya penjelasan aspek kesehatan dari kondisi geosfera.

Keadaan seperti ini memberikan peluang, rendahnya pemahaman siswa mengenai aspek kesehatan dari kondisi geosfera. Padahal, bila dicermati dengan seksama, setiap kondisi dan fenomena geosfera mengandung potensi kesehatan atau bahaya yang bisa berdampak pada kesehatan manusia.

Berdasarkan pemahaman ini, memberikan pengayaan tentang aspek kesehatan dari fenomena geosfera menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kegiatan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan sehingga dapat melahirkan sikap yang bijak bagi seseorang bila akan melakukan perjalanan ke gunung, hutan, atau sungai. Sikap kehati-hatian ini, bukan karena dia merasa takut, namun lebih dilandasi karena dia mengenali karakter dan sifat alam yang memang ada yang potensial berbahaya bagi kesehatan manusia.

*Geografi for life*, mungkin itulah prinsip dasar (falsafah) pemahaman geografi untuk masa kini. Dengan falsafah *Geografi for life*, diharapkan pengetahuan geografi benar-benar dijadikan sebagai obor penerang, panduan, atau informasi yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Hemat kata kata, *Geografi for life* adalah penerapan ilmu geografi dalam meraih kehidupan yang aman, nyaman, sehat dan selamat.

Dalam pelajaran geografi di sekolah, sudah dikenalkan mengenai pengertian geografi. Sudah banyak para ahli yang berbicara mengenai apa arti geografi, dan apa pendekatan ilmiah yang digunakan geografi. Mulai dari para tokoh Yunani, seperti Erathosthenes, Ptolemeus, Strabo, Immanuel Kant, sampai para ahli Geografi Modern dan Geografi Indonesia seperti Copernicus, Preston James, dan Bintarto. Mereka sudah memberikan sumbangan pemikiran mengenai apa dan bagaimana seseorang bisa dikatakan memahami geografi. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang digunakan manusia untuk bisa beradaptasi, berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan sehingga bisa mencapai keserasian hidup manusia dan lingkungan secara berkualitas.

Ada lima hal penting dari definisi geografi ini. *Pertama*, seiring dengan prinsip yang dimiliki yaitu *Geografi for life*, maka ilmu itu adalah bekal manusia dalam mencapai tujuan hidup. Belajar geografi adalah belajar tentang berbagai hal yang terkait dengan fenomena alam untuk tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, belajar geografi itu bukan hanya untuk mengetahui berapa luas laut, ada apa di bawah laut, dan mengapa laut berwarna biru atau kuning. Melainkan memahami hal-hal yang terkait pengetahuan geografi itu, untuk dijadikan bekal supaya dalam suatu saat sumberdaya alam itu bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Itulah yang dimaksud dengan geografi sebagai ilmu terapan.

*Kedua*, belajar geografi ditujukan untuk menjadi bekal manusia supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sebagaimana yang dipelajari geografi, bahwa permukaan bumi ini diisi oleh



anekaragam fenomena dan bentuk muka bumi. Keadaan alam di daerah hutan, berbeda dengan daerah kutub. Demikian pula di daerah laut, gurun, dan sahara. Keanekaragaman fenomena geosfera atau permukaan bumi tersebut, perlu dipahami dan perlu dijadikan informasi oleh manusia, sehingga bila suatu saat berkunjung ke daerah tersebut, manusia dapat beradaptasi.

Bisa beradaptasi dengan lingkungan saja belum cukup. Orang yang belajar geografi dituntut untuk mampu menunjukkan sikap mampu berinteraksi dengan lingkungan. Inilah manfaat *ketiga* dari belajar geografi. Siswa yang belajar geografi diharapkan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara wajar dan melestarikan.

Nilai yang keempat, dengan memahami geografi ini seseorang dapat memanfaatkan sumberdaya lingkungan untuk kepentingan hidupnya. Kekayaan alam yang ada di laut, udara, dan dalam bumi dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Orang yang menguasai informasi bumi, berpeluang untuk dapat mengakses lebih baik terhadap kekayaan alam tersebut.

Sekedar contoh, orang yang tidak tahu mengenai buah merah akan menganggap bahwa buah merah itu hanyalah makanan tradisional masyarakat Wamena – Papua. Tidak lebih dan tidak kurang. Pada diri orang tersebut tidak tertarik terhadap mengenai sumberdaya Buah Merah tersebut. Namun demikian, ketika I Made Budi melakukan penelitian dan kemudian menemukan kandungan dari Buah Merah tersebut kemudian banyak orang berlomba-lomba mengeksploitasi buah merah Papua sebagai makanan yang menyehatkan. Hal ini terjadi pula terhadap buah mengkudu atau mahkota dewa.

Berdasarkan analisa tersebut dapat dikatakan bahwa bila kita tidak mengetahui berbagai sumberdaya alam, kekayaan alam Indonesia maka kita akan menganggap rendah kekayaan alam Indonesia itu. Namun bila kita memiliki pengetahuan yang luas mengenai sumberdaya alam yang ada di bumi Indonesia ini, jangankan hasil hutan, pasir di pinggir laut pun tidak boleh di jual ke luar negeri. Karena kita mengetahui bahwa pasir itu

adalah kekayaan alam yang sangat mahal demi masa depan Indonesia itu sendiri.

Pada tahap inilah, pengetahuan mengenai geografi diharapkan dapat dijadikan sebagai bekal untuk masyarakat Indonesia bisa menghargai dan memanfaatkan kekayaan alamnya demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia itu sendiri. Dan terakhir, ketika memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di Negara Indonesia setiap warga Negara tidak boleh melakukan perusakan.

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dan oleh karena itu tujuan akhir dari memanfaatkan ilmu geografi itu adalah untuk menjaga kelestarian hidup manusia dan lingkungan itu sendiri. *Semakin tinggi pengetahuan geografinya, semakin cinta terhadap kelestarian social dan kelestarian alam.* Itulah hakikat belajar geografi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, prinsip dasar yang perlu dikembangkan saat ini yaitu memanfaatkan ilmu geografi untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, prinsip *Geografi for life* lebih ditekankan pada penelaahan mengenai aspek-aspek kesehatan dalam berbagai fenomena geosfera, sehingga manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan secara aman, nyaman dan selamat. Cabang kajian dalam bidang ini melahirkan ilmu geografi kesehatan.

Istilah geografi kesehatan (*medical geography*) merupakan wilayah kajian yang baru dalam bidang kesehatan dan bidang geografi. Kajian geografi kesehatan merupakan kajian *hybrid* (perpaduan) antara ilmu geografi dan kesehatan dimana aspek-aspek geografi dikaitkan dengan masalah kesehatan atau perawatan kesehatan.

Studi geografi kesehatan (*medical geography*) diantaranya adalah mengkaji aspek dan dampak lokasi serta iklim terhadap kesehatan. Misalnya saja, di daerah gunung suhu udara akan lebih dingin daripada di daerah pantai, dan hal ini akan

berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Keadaan alam di daerah pegunungan potensial menyebabkan masyarakat kekurangan garam-garaman dibandingkan masyarakat pantai. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan alam memberikan pengaruh terhadap kesehatan.

Dalam studi geografi kesehatan pun dikaji mengenai potensi kesehatan dan atau potensi ancaman (bahaya) dari berbagai fenomena geosfera. Kaitan dengan masalah ini, Sukanddarumidi (2006) sudah memberikan paparan ilmiah mengenai pemanfaatan sumberdaya alam (geologis) bagi usaha peningkatan hidup yang sehat. Sukanddarumidi menyebutnya sebagai geologis medis.

Apapun istilah atau konsepnya, hal yang mendesak saat ini yaitu pentingnya guru geografi memberikan paparan tambahan (suplemen) mengenai potensi kesehatan (ancaman bahaya) dari kondisi geologis atau kondisi geografis tertentu. Dengan demikian, dengan belajar geografi seseorang dapat beradaptasi dan hidup aman, nyaman dan selamat. Hemat kata, geografi kesehatan merupakan satu kajian yang memiliki wilayah padu antara aspek geografi dan aspek-aspek kesehatan. Dengan memberikan penjelasan mengenai geografi kesehatan ini, diharapkan kasus kurang hati-hatinya pelajar ke wilayah gunung yang mengandung asap belerang dapat dihindari.

### ***Pramuka For Life<sup>3</sup>***

Pramuka merupakan organisasi sosial kepemudaan yang sudah memiliki jam terbang luas. Keberadaan organisasi ini bukan hanya hadir di tingkat satuan pendidikan, namun sudah berurat berakar dalam skala internasional. Khusus untuk konteks keindonesiaan, melalui berbagai programnya organisasi pramuka telah berusaha menancapkan peran dan kontribusinya baik dalam mendukung proses pendidikan kepemudaan maupun

---

<sup>3</sup> SKM Medikom. Tahun IV. Edisi 235. 6 – 12 Agustus 2007

gerakan perjuangan bangsa. Tidak mengherankan bila sejarah Indonesia mencatat pasang surut gerakan kepramukaan dalam mendukung proses kemerdekaan dan perjuangan bangsa. Insiden seperti ini, sempat terjadi di zaman kolonialisme masa lalu. Pemerintah Belanda ataupun Negara Jepang di masa berkuasanya sempat menghapuskan keberadaan gerakan kepanduan Indonesia yang dikenal sebagai organisasi kepanduan yang sarat dengan jiwa kemandirian, nasionalisme dan kesatuan.

Sebagaimana tercatat, sebelum tahun 1938 gerakan kepanduan di Indonesia muncul di berbagai instansi atau komunitas sosial. Misalnya Pandu Kesultanan, Pandu Pemuda Sumatera, dan Indonesische Padvinders Organisatie (INPO). Kemudian masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi kepanduan tersebut dilarang.

Apa pelajaran menarik dari sejarah kepramukaan di Indonesia ? dan bagaimana mengartikulasikan nilai-nilai kepanduan dalam konteks pembangunan Indonesia masa kini. Inilah persoalan yang perlu dicermati secara seksama oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya oleh kalangan penggiat kepanduan di Indonesia.

*Pertama*, realitas sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan di Indonesia sempat tumbuh kembang di berbagai instansi, komunitas sosial atau organisasi sosial masyarakat. Tak jarang pula organisasi sosial politik pun memiliki gerakan kepanduan (pramuka) tersendiri. Maka tidak mengherankan pada masa itu muncul Hizbul Wathon, Pandu Islam Indonesia, Pandu Katholik, dan Pandu Kesultanan.

Fenomena ini merupakan satu kondisi yang sangat menguntungkan bagi proses pembangunan karakter bangsa. Karena pada satu sisi, pemuda Indonesia dapat dihimpun dalam organisasi-organisasi sosial secara baik, dan pada sisi lain lembaga (gerakan kepanduan) tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan kepemudaan. Bahkan tidak mustahil melalui gerakan kepanduan inilah jiwa

nasionalisme dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan pemuda Indonesia.

Berbeda dengan realitas sejarah tersebut, pada saat ini gerakan kepanduan (pramuka) ternyata hanya hidup di tingkat satuan pendidikan. Kendatipun secara teoritik gerakan pramuka dikategorikan sebagai pendidikan luar sekolah, namun ternyata hanya tumbuh subur di lingkungan pendidikan. *Wa bil khusus*, gerakan pramuka ini (hanya) sangat ramai ditingkat pendidikan sekolah dasar. Sementara organisasi sosial dan instansi di luar lembaga pendidikan, sudah sangat jarang membuka program kepanduan (pramuka). Padahal, sudah sejak 1987, kwartir nasional sudah menegaskan bahwa gugus depan (gudep) dapat didirikan di lembaga pesantren, asrama militer, RT/RW bahkan perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun pada kenyataannya, pramuka kini hanya hidup di lingkungan pendidikan formal. Kondisi ini, sudah tentu sangat memprihatinkan kita semua. Selain menyebabkan mengkerdilnya ruang komunitas aktivis pramuka, juga menggambarkan bangsa Indonesia kehilangan modal sosial yang potensial dalam proses pembinaan dan pemberdayaan pemuda Indonesia.

*Kedua*, dalam sejarah pramuka di Indonesia menunjukkan bahwa gerakan kepanduan mampu berkiprah dalam konteks nasional. Adanya peran pramuka (gerakan kepanduan) dalam konteks nasional ini, sudah tentu terinspirasi dari awal mula lahirnya pramuka.

Di pertengahan abad XIX, Baden Powell di Inggris merumuskan dasar-dasar kepramukaannya dalam membangun kejayaan Inggris. Selain itu Baden Powell pun merumuskan sendi-sendi gerakan "kepramukaan" ditunjukkan untuk membangun organisasi yang bertujuan melakukan pembinaan bagi kalangan generasi muda. Pada konteks lain, gerakan kepanduan di Indonesia di awal sejarah dan awal kemerdekaan Indonesia, ternyata mampu menghimpun kekuatan bangsa dalam mencapai tujuan kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan Indonesia.

Seiring dengan hal ini, pramuka Indonesia saat ini memang bukan hidup di zaman pergolakan kebangkitan revolusi industri

atau Perang Dunia seperti halnya yang dialami Boden Powell atau gerakan pramuka di Inggris saat itu. Gerakan Pramuka Indonesia saat ini bukan lagi hidup di jaman perjuangan kemerdekaan, layaknya KH. Agus Salim atau Ir. Djuanda yang berjuang untuk mempertahankan eksistensi pramuka dari ancaman pembubaran oleh kaum kolonialis. Pramuka Indonesia saat ini adalah organisasi yang hidup di era reformasi Indonesia yang hidup di zaman Indonesia yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu tampaknya spirit gerakan pramuka perlu dikontektualisasikan ke dalam kebutuhan dan tantangan zaman saat ini.

Berdasarkan analisa ini, kita sepakat dengan keinginan pemerintah SBY-JK untuk melakukan revitalisasi gerakan pramuka. Atau setidaknya gerakan pramuka Indonesia saat ini perlu (1) mempertahankan semangat kepanduan dalam memberdayakan potensi sumber daya manusia, (2) menjunjung semangat nasionalisme dan (3) mendukung visi dan misi nasional. Dengan memperhatikan masalah ini maka gerakan pramuka Indonesia saat ini, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan reformasi sebagai bagian dari kepedulian pramuka dalam mendukung dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*Ketiga*, dengan memperhatikan tuntutan kehidupan zaman maka dapat disimpulkan bahwa para penggiat kepanduan di Indonesia perlu ada revitalisasi syarat-syarat kecakapan umum para pandu Indonesia. Bila Boden Powell mengembangkan sandi-sandi komunikasi untuk hidup di alam bebas dan terbuka, maka hal itu adalah mudah dipahami. Selain perkembangan teknologi komunikasi yang masih terbatas juga kebutuhan konteks hidup di alam saat itu.

Dengan tetap memperhatikan semangat juang untuk tetap mengembangkan potensi komunikasi yang ada, maka di era modern ini seorang pandu dituntut untuk memiliki kecakapan komunikasi dengan sandi-sandi digital (misalnya internet dan komputer). Tanpa harus dipahami bahwa sandi morse, sandi rumput, semaphore, sandi AN, sandi AZ tidak perlu dipelajari. Keterampilan-keterampilan khas pramuka tersebut masih tetap

diperlukan. Namun pramuka modern saat ini, perlu pula memahami sandi-sandi intelijen modern dan teknologi komunikasi global. Sehingga pramuka tidak dicitrakan sebagai gerakan kepanduan yang bisa hidup di belantara namun gagal hidup di belantara digital (elektronik). Dengan sandi morse dan semaphore, seorang pramuka bisa berkomunikasi jarak jauh di hutan belantara dan dengan internet seorang pandu dapat hidup di belantara dunia maya (*virtual world*). Berdasarkan cermatan ini, maka SKU pramuka Indonesia tampaknya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

*Keempat*, pramuka Indonesia perlu kembali menekankan pada misi pemandirian dan pembebasan pemuda. Semenjak kelahirannya, gerakan kepanduan bukanlah gerakan yang manja terhadap kemewahan fasilitas hidup dan kenyamanan lingkungan. Gerakan kepanduan adalah gerakan yang memberikan pembelajaran kepada para pemuda untuk mampu hidup mandiri di lingkungan yang ditinggalkannya. Di lingkungan masyarakat seorang pramuka bisa bergaul dan di hutan belantara seorang pandu dapat menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hidup (*struggle for life*). Semangat kemandirian inilah yang perlu dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Sayangnya, pramuka-pramuka yang ada saat ini, masih tergantung pada sumberdaya pangkalannya masing-masing. Dan proses pendidikannya lebih banyak bersifat formalistik, sehingga kurang mendukung pada proses pendidikan kader atau kepemimpinan pada para anggota-anggotanya.

Dengan tiga hal tersebut, penulis merasa yakin bahwa pramuka Indonesia akan kembali menjadi organisasi kepemudaan atau lingkungan pembelajaran yang diminati masyarakat.